



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIUS UMBU HUNGGAR
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 470668

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.260.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/72 m² di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 5738 m²/2046 m² di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 2233 m² di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 473 m² di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 304.000.000

1. MOBIL, RUSH TOYOTA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, ISUZU/ NHR 55 CC E2 1 LIGHT TRUCK BOX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 785.079.100**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.388.579.100



III. HUTANG

Rp.

60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.328.579.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.